

Tuntutan dari Pemberi Gadai Atas Penerbitan Sertipikat Tanah yang Diperoleh dari Gadai Tanah di Kabupaten Sumba Barat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/PDT/2020) = The Assertion from the Pawners about Certificates Publishing Obtained from Land Pawning in West Sumba (Study of the Supreme Court Decision Number 12 PK/PDT/2020)

Silalahi, Irene Cristna, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920556665&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini membahas penerbitan sertipikat di atas tanah gadai dan wewenang kantor pertanahan dalam menyikapi tuntutan atas penerbitan sertipikat tanah. Latar belakang didasari pada pelaksanaan gadai tanah yang tidak berasaskan prinsip tolong-menolong berupa kegiatan pendaftaran tanah oleh penerima gadai dan jangka waktu lima tahun untuk mengajukan keberatan menjadi batasan pihak terkait untuk menuntut hak atas tanah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah proses penerbitan sertipikat yang memiliki riwayat gadai tanah dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/PDT/2020 dan wewenang Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dalam menyikapi tuntutan masyarakat atas penerbitan sertipikat yang telah melebihi jangka waktu lima tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan identifikasi permasalahan (problem identification). Analisa data dilakukan secara deskriptif dengan menekankan pada korelasi konsep ideal gadai tanah dengan kegiatan pendaftaran tanah dan penerapan limitasi jangka waktu lima tahun untuk mengajukan tuntutan dengan memfokuskan pada wewenang kantor pertanahan. Hasil analisa adalah proses penerbitan sertipikat di atas tanah gadai ke atas nama penerima gadai tidak sejalan dengan konsep gadai tanah karena kepemilikan tanah tidak berakhir selamanya kepada penerima gadai dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat tetap memiliki wewenang dalam menangani tuntutan atas penerbitan sertipikat sekalipun telah melebihi jangka waktu lima tahun.

.....This research discusses the certificates publishing in the land pawning and the authority of the land office on the demands of the certificates publishing. The background is based on the implementation of land pawning that had not suitable with the principle of mutual assistance by the land registration activities of pawn recipients and the term of five years to file an objection to limit the related parties to claim the land rights. The problem in this research is the process of the certificates publishing that has a history of land pawning linked to the Supreme Court's Decision Number 12 PK/PDT/2020 and the authority of the West Sumba Regency Land Office in responding to the demands of the certificates publishing that has exceeded five years. The method in this research is normative with a problem identification approach. Data analysis is descriptive by emphasizing the correlation of the ideal concept of land pawning with the land registration activities and the implementation of five years limitations to propose the claim by focusing on the authority of the land office. The result of the analysis is the process of certificate publishing on pawned land on behalf of the pawnee is not in line with the concept of land pawning because land ownership does not end forever with the pawnee and the West Sumba Regency Land Office still has the authority to handle demands for the issuance of a certificate even though it has exceeded more than five years.